

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ditengah-tengah kehidupan dunia yang semakin terbuka dan persaingan bangsa yang semakin ketat, hampir semua Negara di dunia termasuk Indonesia menggariskan komitmen untuk melakukan proses pembangunan karakter bangsa (*national and character building*) Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya

Untuk mewujudkan pembangunan nasional dibidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta kebutuhan pembangunan. Dalam membentuk warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab diperlukan pendidikan yang berkualitas. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No.20 tahun 2003, pasal 1 (ayat 1) menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan diharapkan akan membawa perubahan bukan hanya bertambahnya pengetahuan akan tetapi yang mengutamakan terjadinya perubahan sikap, perilaku dan nilai pada individu, kelompok, masyarakat, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang mengantarkan orang-orang lebih bersifat terbuka terhadap berbagai kebutuhan yang bervariasi dan memberi jalan kearah pemenuhannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut ditempuh dengan menyelenggarakan dua jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan formal dan non formal. Kedua jalur pendidikan tersebut pada umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan pendidikan nasional

Sekolah sebagai jalur pendidikan formal memiliki identitas dan karakter tersendiri dibandingkan dengan jalur pendidikan lainnya. Identitas tersebut terlihat dari disusunnya kurikulum persekolahan yang memuat bahan ajar, metode pengajaran, media pengajaran dan evaluasinya, kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa sekolah merupakan wadah belajar yang sangat strategis dalam mempersiapkan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh A. Kosasih Djahiri(1985 : 4) , bahwa :

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan tempat belajar anak didik dalam berusaha membina, mengembangkan dan menyempurnakan potensi dirinya serta dunia kehidupan dan masa depannya. Sekolah merupakan salah satu tempat mempersiapkan generasi muda mendatang menjadi manusia dewasa dan berbudaya.

Dengan demikian sekolah menduduki posisi strategis bagi perkembangan manusia khususnya peserta didik, sehingga nantinya sekolah mampu melahirkan

manusia manusia yang berilmu pengetahuan, memiliki sikap yang baik, berbudi pekerti yang luhur serta berkepribadian yang kuat.

Oleh karenanya dewasa ini banyak orang tua yang percaya untuk menyerahkan pendidikan anak-anaknya ke sekolah sebagai tempat untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap moral pancasila, dengan alasan :

- a. Sekolah adalah tempat yang amat strategis bagi usaha mewujudkan cita cita bangsa
- b. Melalui sekolah, bahan pengajaran, tujuan pengajaran, metode pengajaran, media pengajaran dan evaluasi pengajaran PPKn dapat dikembangkan
- c. Di sekolah pengawasan terhadap pelaksanaan pengajaran PKn tersebut dapat di laksanakan

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tercantum dalam Kurikulum 2006 (Depdiknas, 2006:49) mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya.

4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah merupakan suatu mata pelajaran inti yang diberikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu yang diajarkan di sekolah mempunyai peranan penting dalam rangka menyiapkan manusia Indonesia seutuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa : “ isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan”. Artinya bahwa PKn merupakan mata pelajaran inti atau pendidikan umum yang wajib diikuti oleh siswa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Dengan demikian maka program pendidikan diarahkan pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila yakni nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan nilai moral agama.

Adapun mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam kurikulum 2006 (Depdiknas, 2006:56) adalah sebagai berikut :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945

Dengan memperhatikan fungsi diatas maka dapat dilihat betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan sehingga adanya hal ini diharapkan seluruh siswa dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Yang menarik dari keberadaan mata pelajaran PKn saat ini bahwa di satu sisi PKn merupakan mata pelajaran yang sangat penting bagi pembangunan karakter bangsa dan sebagai komponen utama pendidikan demokrasi, tetapi di sisi lain terdapat permasalahan yang timbul dalam pembelajaran PKn di sekolah. Setelah penulis melakukan observasi awal di sekolah, penulis menemukan masih banyak permasalahan yang menyangkut pembelajaran PKn antara lain kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti mata pelajaran tersebut. Siswa menganggap bahwa mata pelajaran PKn tidak menarik dan membosankan.

Dalam kenyataannya di lapangan kesan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, jika dipandang dari proses pembelajaran hal ini diakibatkan secara substansif mata pelajaran PKn kurang menyentuh kebutuhan siswa.

Salah satu aspek yang menentukan dalam proses pembelajaran adalah guru. Fenomena yang di temukan dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan sekarang ini lebih mengutamakan tujuan pembelajaran ketimbang proses pembelajaran yang seharusnya sehingga seringkali siswa dijadikan sebagai objek pembelajaran padahal yang seharusnya bukan hanya sebagai objek pembelajaran tetapi juga sekaligus subjek pembelajaran dalam proses pendidikan. Mata pelajaran kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang dirasakan semakin menurun citranya di kalangan masyarakat luas. Hal tersebut

dikarenakan selain dianggap salah satu mata pelajaran yang membosankan dan tidak menarik juga dianggap kurang efektif dan tidak menyentuh kebutuhan siswa.

Hasil wawancara dengan beberapa orang siswa diperoleh informasi bahwa yang menjadi alasan mereka kurang menaruh perhatian belajar terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan disebabkan gaya mengajar guru yang kurang menarik, monoton, tidak bervariasi serta dalam menerangkan materi guru tidak memperkaya dengan sumber sumber lain, juga tidak menghubungkan materi pelajaran dengan masalah masalah yang aktual.

Bila hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat respon dari pihak pihak yang berkepentingan dalam proses pembelajaran dapat berdampak terhadap menurunnya motivasi belajar siswa terutama terhadap mata pelajaran kewarganegaraan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran didukung oleh komponen komponen pembelajaran yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain (interrelasi). Komponen pembelajaran itu adalah tujuan, bahan, siswa guru, metode, situasi, dan evaluasi. komponen ini kemudian disatukan dalam sebuah desain program pembelajaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **David Kerr** (1999 : 25) di berbagai Negara, bahwa PKn memiliki beberapa ciri maksimal dan minimal. Ciri minimal dari penelitian tersebut yang terdapat di Indonesia diantaranya adalah PKn bersifat elitis, artinya dalam proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, tidak ada umpan balik (*feed back*). Yang dimaksud umpan balik disini adalah segala informasi baik yang menyangkut output ( siswa lulusan ) maupun transformasi.



Muhibbin Syah (2004: 26) mengelompokkan pembahasan proses belajar mengajar kedalam tujuh bagian,yaitu:

1. Manajemen ruang belajar (kelas) yang sekurang-kurangnya meliputi pengelolaan kelas dan iklim kelas.
2. Metodologi kelas (metode pengajaran).
3. Motivasi siswa peserta kelas.
4. Penanganan siswa yang berkemampuan luar biasa.
5. Penanganan siswa yang berperilaku menyimpang.
6. Pengukuran kinerja akademik siswa.
7. Pendayagunaan umpan balik dan penindak lanjutan.

Dalam hal penanganan manajemen atau proses penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yakni pendayaan umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input (siswa) maupun transformasi (mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi). Lulusan yang kurang bermutu atau yang belum memenuhi harapan, akan menggugah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang bermutunya lulusan.

Dalam mengelola proses belajar mengajar, kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan rencana yang telah disusun. Oleh karena itu diperlukan suatu kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga kelas berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan pengajaran dapat tercapai. Selain itu, kondisi dan situasi tersebut perlu diciptakan sedemikian rupa agar proses komunikasi baik dua arah maupun multi arah antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar dapat berjalan secara demokratis. Alhasil, baik guru sebagai pengajar maupun siswa sebagai pelajar dapat

memainkan peranan masing-masing secara integral dalam konteks komunikasi instruksional yang kondusif dan membuahkan hasil

Melalui mata pelajaran PKn ini dapat dikembangkan berbagai kemampuan dasar warga Negara seperti: berpikir kritis, dapat mengambil keputusan secara tepat, memegang teguh aturan yang adil, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sasaran akhir mata pelajaran PKn tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan tetapi lebih ditekankan pada proses untuk mencapai penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat memberikan bekal bagi siswa dalam menghadapi kehidupan nyata di lingkungannya dikemudian hari.

Permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian dan mengkaji bagaimana gambaran umum mengenai pendidikan kewarganegaraan yang cenderung bersifat *elitis*. Atas dasar pertanyaan tersebut penulis mengambil judul penelitian : **Kajian Tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) yang Bersifat Elitis** (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Lembang Kabupaten Bandung Barat)

## **B. Rumusan dan Pembatasan Masalah**

### a. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan proses penelitian dan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penelitian ini, maka secara umum masalah yang



akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana gambaran umum tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat *elitis* di SMP Negeri 1 Lembang Kab. Bandung Barat ?

b. Pembatasan Masalah.

Untuk memudahkan penganalisaan hasil penelitian, maka rumusan masalahnya perlu dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana standar isi PKn SMP dikembangkan dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)?
2. Bagaimana implementasi pengembangan silabus dan RPP dalam proses pembelajaran PKn di kelas?
3. Apakah penyebab PKn yang bersifat *elitis* di SMP Negeri 1 Lembang Bandung?
4. Bagaimana dampak yang di timbulkan dari pembelajaran PKn yang bersifat *elitis* ?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan guru PKn dalam mengatasi PKn yang bersifat *elitis* ?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dikemukakan diatas, yang secara umum adalah untuk memperoleh gambaran secara nyata bagaimana gambaran umum tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Bersifat *Elitis* di SMP Negeri 1 Lembang Kab.Bandung Barat.

Sedang secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana standar isi PKn SMP dikembangkan dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)?
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan silabus dan RPP dalam proses pembelajaran PKn di kelas ?
3. Untuk mengetahui apakah penyebab ciri PKn yang bersifat *elitis* di SMP Negeri 1 Lembang ?
4. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran PKn yang bersifat *elitis* ?
5. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan guru PKn dalam mengatasi PKn yang bersifat *elitis*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia pendidikan terutama bagi peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan

##### **2. Manfaat praktis**

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, terutama pihak pihak yang berhubungan dengan dunia kependidikan seperti :

###### **a. Bagi Guru**

- 1) Untuk memperbaiki proses pembelajaran khususnya dalam pelajaran PKn jika ditemui adanya kesulitan dari faktor guru di lapangan.
  - 2) Memperhatikan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran di kelas .
  - 3) Dapat mengembangkan inovasi dalam menggunakan metode pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan efektif.
- b. Bagi siswa
- 1) Membantu siswa mengatasi permasalahan dalam belajar baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain.
  - 2) Meningkatkan pola interaksi beragam antara siswa dengan siswa ataupun antara guru dengan siswa.
- c. Bagi sekolah
- 1) Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya melalui pendidikan kewarganegaraan.
  - 2) Sekolah diharapkan mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial dan berkualitas.

## E. Kerangka Pemikiran

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives", maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Winataputra (2007:6) bahwa "citizenship or civics education atau pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggungjawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warganegara tersebut". Jadi sasaran pendidikan kewarganegaraan adalah warganegara dan yang menjadi fokus adalah generasi muda, hal ini dilakukan karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan meneruskan roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Margaret S. Branson (1999:4) mengidentifikasi tiga komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (watak-watak kewarganegaraan). Komponen pertama, *civic knowledge*

“berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara” (Bransons 1999:8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Kedua, *Civic Skills* meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.

Ketiga, *Civic Disposition* (Watak-watak kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi,

dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.

Untuk mencapai ketiga kompetensi tersebut diperlukan pembelajaran PKn yang efektif, sehingga kompetensi-kompetensi tersebut bisa tercapai. Dalam demokrasi konstitusional, "*civic education* yang efektif adalah suatu keharusan" (Benjamin Barber, 1992), karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai.

Studi tentang *Civic Education* yang dilakukan oleh *National Foundation for Educational Research in England and Wales* (NFER) menghasilkan beberapa temuan, diantaranya adalah deskripsi tentang "*citizenship education continuum*" MINIMAL dan MAKSIMAL (Kerr, 1999:5). *Citizenship Education* pada titik minimal ditandai oleh "*thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge based, didactic transmission, easier to achieved and measure in practice* (Kerr, 1999:6)". Maksudnya adalah didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan (*Civic Education*), bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, hasilnya mudah diukur.

Sedangkan yang bersifat maksimal ditandai oleh "*thic, inclusive, activist, citizenship education, participative, process led, values based, interactive*



*interpretation, more difficult to achieve and measure in practice*” (Kerr, 1999:7). Maksudnya adalah didefinisikan secara luas, mewadahi berbagai aspirasi dan menitikberatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal, dilabeli “citizenship education”, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar.

Berdasarkan konseptualisasi di atas, Kerr (1999:16) mengemukakan bahwa di negara-negara Asia Tenggara “*citizenship education*” lebih mencerminkan kategori “MINIMAL” sebagai “*Education About Citizenship*”, yaitu memusatkan perhatian pada “...*providing students with sufficient knowledge and understanding of national history and the structures and processes of government and political life*”.

Berdasarkan temuan di atas, khusus dalam hal pendekatan dan proses pembelajaran, terungkap bahwa di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia digolongkan sebagai...” *elitis* “ ...atau dalam proses belajar mengajar pelaksanaannya lebih terpusat pada guru, tidak ada umpan balik (*feed back*). Yang dimaksud umpan balik disini adalah segala informasi baik yang menyangkut output (siswa lulusan) maupun transformasi. Dalam hal penanganan manajemen atau proses penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yakni Umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input (siswa) maupun transformasi (mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi). Lulusan yang kurang bermutu atau yang belum

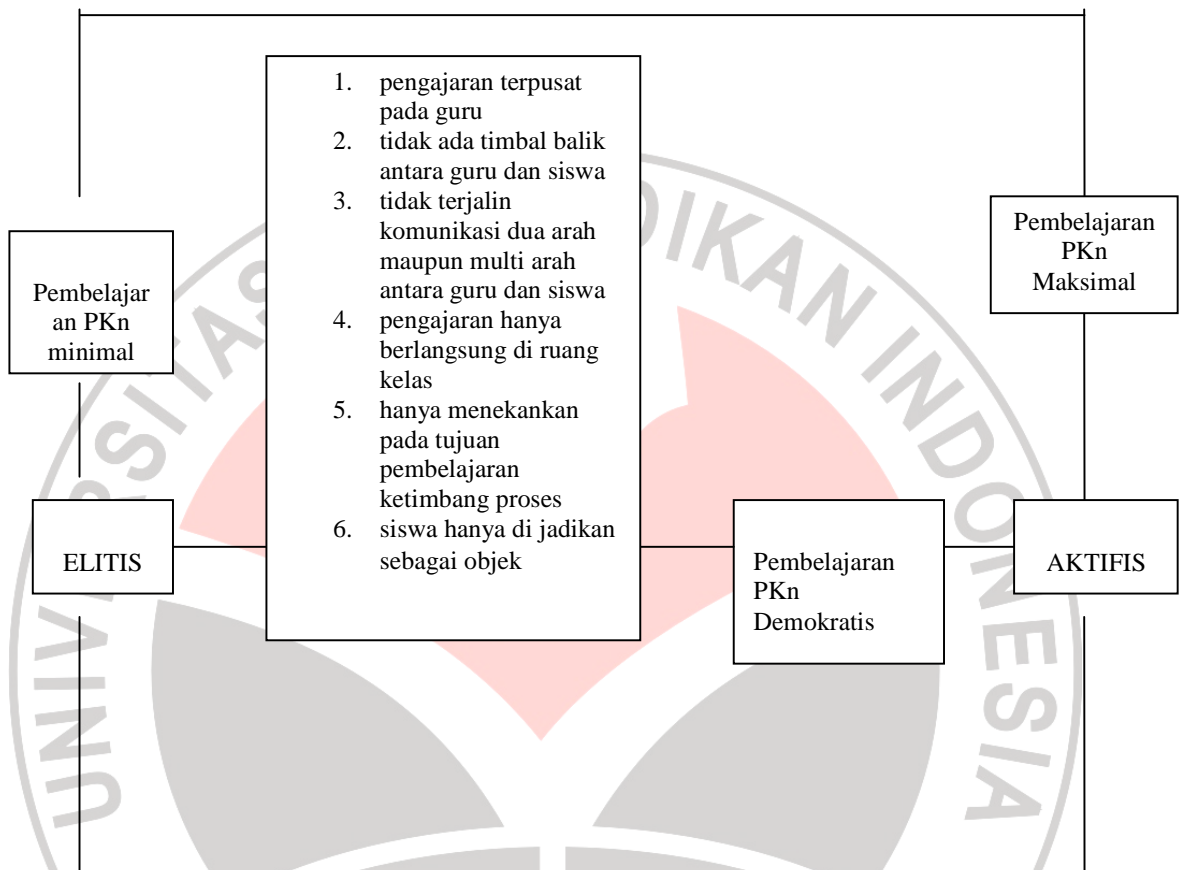
memenuhi harapan, akan menggugah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang bermutunya lulusan.

Menyadari betapa penting yakni Pkn sebagai wahana untuk mengembangkan nilai-nilai dan moral yang berakar pada budaya Indonesia, maka para guru dituntut mengerahkan segala kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa guru memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru harus dapat memanfaatkan peranannya dalam usaha membantu perkembangan siswa. Dalam memberikan materi guru harus dapat melibatkan siswa pada masalah yang sedang aktual sehingga siswa di tuntut berfikir kreatif.

Dalam menyajikan materi pelajaran guru hendaknya dapat berperan ganda, bukan saja sebagai perencana yang mempersiapkan apa saja yang dilakukan dalam PBM tetapi juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang baik, sehingga timbul komunikasi antara guru dan siswa, pembelajaran tidak hanya di dominasi oleh guru saja yang pada akhirnya siswa akan menyadari pentingnya pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian diatas, kajian tentang kecenderungan pembelajaran PKn yang bersifat elitis dan lebih mengutamakan proses pembelajaran penting dilakukan agar pembelajaran PKn dapat dilakukan secara aktifis. Secara visual, kerangka pikiran diatas dituangkan dalam bagan sebagai berikut :



## **F. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode penelitian**

Berdasarkan apa yang diungkapkan diatas, maka metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Mulyana (2002: 201) mengatakan bahwa “studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek dari seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial”.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Wawancara**

Wawancara atau interview yaitu suatu proses Tanya jawab lisan yang merupakan alat alat pengumpul informasi secara langsung tentang jenis data yang terpendam. Kartini Kartono (1990 : 187) menjelaskan pengertian wawancara sebagai berikut : “ wawancara adalah suatu percakapan lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu (interview = berbincang bincang, Tanya jawab, asal kata interview = perjumpaan) sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dengan maksud untuk

dipublikasikan. Tentang maksud dari wawancara sebagai teknik penelitian, dikemukakan oleh Lexy J Maleong (1996 : 148) sebagai berikut :

Mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, persamaan motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan – kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami di masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai anggota “.

b. Studi dokumentasi

Studi Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh informasi/data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti berupa jumlah data dan unsur-unsur yang berhubungan dengan masyarakat

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang sedang diteliti dan dapat memberikan deskripsi mengenai gambaran umum objek yang akan diteliti.

Observasi penelitian ini antara lain pelaksanaan PBM PKn serta sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lembang Kab Bandung Barat.

#### **G. Lokasi dan subjek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan maka yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lembang Kabupaten Bandung yang berlokasi di Jalan Raya Lembang no 315 . Subyek penelitian dipilih secara bertujuan (*purposive*) yaitu subyek yang dapat memberikan informasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang dan disiapkan atau yang akan muncul kemudian selama berlangsungnya penelitian (Nasution, 2003:32). Dalam penelitian ini subyek penelitian diambil dari unsur guru dan siswa. Untuk menentukan jumlah subjek penelitian digunakan teknik sampling gelinding bola salju ( *snow ball sampling techniq* ), yaitu responden diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian responden ini diminta pula menunjuk orang lain, dan seterusnya Nasution ( 2003: 32 ).

#### **H. Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditekankan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagai yang disarankan oleh data (Maleong, 2002:280).



Ada banyak macam cara untuk menganalisis data kualitatif, salah satunya menurut Nasution (2003:129) yakni dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Reduksi data**

Adalah abstrak atau merangkum data dalam suatu laporan yang lebih sistematis difokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

### **2. Display Data**

Display data dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran penelitian secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Display data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk matriks hasil temuan penelitian.

### **3. Kesimpulan dan Verifikasi**

Kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan. Upaya ini sebagaimana diungkapkan oleh Nasution (2003:130), dilakukan dengan cara mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang seing timbul dan sebagainya. Jadi kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.